

DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM PEMIKIRAN DAN PRAKTIK POLITIK

Anwar Ilmar

**Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

Email: anwar.ilmar@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini hendak mengulas tentang demokrasi terpimpin sebagai salah satu varian demokrasi yang berkembang di Indonesia. Demokrasi terpimpin merupakan konsep pemikiran politik Sukarno sebagai antitesis dari demokrasi yang berkembang di Barat. Dalam pemikiran politik Sukarno, wacana demokrasi memang relevan dengan kultur masyarakat Indonesia yang bermusyawarah. Meski demikian, praktik demokrasi di negara-negara Barat dianggap Sukarno memiliki cacat struktural. Demokrasi *ala* Barat dianggap hanya menjamin kebebasan politik, namun tetap memberikan dukungan ideologis pada penindasan ekonomi. Oleh karena itu, Sukarno merumuskan gagasan tentang sosio-demokrasi, yaitu demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Di kemudian hari, gagasan tersebut kembali diformulasikan sebagai model kekuasaan negara yang dinamakannya sebagai Demokrasi Terpimpin. Dalam ekonomi, konsep ini disebut ekonomi terpimpin. Pada praktiknya, kedua konsep tersebut ternyata justru menjauh dari gambaran ideal pemikiran politik Sukarno untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, karena konfigurasi politik demokrasi terpimpin tak mampu lagi menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing.

Kata Kunci: demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, Sukarno

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang cukup mengejutkan bukan hanya dalam pemikiran dan teori politik, tetapi dalam praktik dan kesadaran historis masyarakat, bahwa demokrasi telah diakui hampir secara universal sebagai bagian penting dalam kehidupan politik modern. Itulah sebabnya, teoritis liberal seperti Fukuyama (2006) berani mengatakan bahwa perang (ideologi) global telah diakhiri dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Ditambah lagi dengan studi Huntington yang menjelaskan berbagai fase pasang surut

terjadinya proses demokratisasi dalam menjebol rezim otoriter di abad ke-20 sebagai suatu gelombang demokratisasi (Reilly, 2001). Maka, tak mengherankan jika demokrasi kini telah menjadi wacana *mainstream* dalam berbagai studi dan praktik politik.

Sebagai suatu pemikiran dan teori politik, demokrasi mengandung nilai-nilai universal yang mendasar, yakni kebebasan dan persamaan. Di Barat (Eropa dan Amerika), dua nilai tersebut memiliki penganut setianya masing-masing yang dikaji, dirumuskan, dan diperdebatkan baik secara normatif-idealis maupun empirik-praktis. Nilai kebebasan diusung oleh kelompok liberal, sedangkan nilai persamaan diusung oleh kelompok sosialis. Bagi kelompok sosialis, prinsip kebebasan dinilai gagal menyediakan syarat-syarat bagi kooperasi dan persamaan sosial. Sebaliknya, kalangan liberal menilai prinsip persamaan cenderung mensubordinasikan hak-hak individu di hadapan kepentingan atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Gould, 1993). Pertentangan tersebut menjadi semakin kontras secara ideologis melalui perang wacana yang *vis a vis* antara liberalisme dan sosialisme.

Tidak hanya di Barat, pertentangan dua nilai demokrasi tersebut juga terjadi di Indonesia bahkan sejak pra kemerdekaan Republik Indonesia yang diwarnai dengan perdebatan intelektual para tokoh pergerakan saat itu seperti Sukarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Sukarno dan Tan Malaka adalah dua tokoh yang pemikiran demokrasiya lebih menitikberatkan pada nilai persamaan dan kolektifitas, sedangkan Hatta dan Syahrir adalah dua tokoh yang pemikiran demokrasiya mengutamakan nilai kebebasan yang setara bagi tiap individu.

Pergulatan politik tersebut berlanjut di masa kemerdekaan terutama dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara Republik Indonesia. Berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang mengamanatkan demokrasi presidensial, maka Sukarno sebagai Presiden yang terpilih secara aklamasi, merumuskan gagasannya tentang Partai Negara — yang merupakan idenya pada masa pergerakan dahulu dengan membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) — di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai alat persatuan bangsa menghadapi perjuangan revolusi. Namun kurang dari tiga bulan pasca proklamasi, sistem presidensial tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Maklumat No. X

tahun 1945 oleh Wakil Presiden Hatta yang menandai berlakunya demokrasi liberal dengan sistem parlementer dan berpartai banyak (multipartai).

Demokrasi liberal yang berjalan sejak November 1945 itu ditandai oleh pergantian cepat kepala pemerintahan serta pemberontakan berbasis agama dan regional (Wilson, 2013). Presiden Sukarno yang didalam sistem parlementer tersebut hanya berperan sebagai kepala negara saja kian menyesalkan jalan demokrasi yang ditempuh tersebut karena dianggap hanya menuju ke perpecahan dan instabilitas. Keadaan ini berlanjut hingga pasca pemilu tahun 1955, di mana konflik antar partai tak kunjung mereda sehingga Sukarno berniat untuk mengubur partai-partai yang hanya mencari keuntungan kepentingan kelompoknya.

Instabilitas tersebut turut mengusik kalangan militer yang banyak mengurus berbagai konflik di daerah dan menuding demokrasi liberal dengan sistem parlementer sebagai biang keladinya. Dengan mendapat dukungan militer dan elemen kekuatan politik lainnya termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), kondisi demikian mendorong Sukarno untuk mengambil inisiatif mempersatukan bangsanya dengan mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin”.

Melalui Dekrit 5 Juli 1959, Sukarno mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 dan dengan demikian mengubah rezim kekuasaan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Dinamika politik tersebut juga diikuti dengan perubahan konfigurasi politik yang berlandaskan pada sistem presidensial. Demokrasi terpimpin membawa obsesi untuk mempersatukan kembali kekuatan kaum marhaen yang terfragmentasi melalui poros kekuatan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau Nasakom. Perpecahan massa marhaen tersebut banyak disebabkan oleh pertikaian politik yang dimainkan oleh elit partai. Sehingga tujuan kemerdekaan nasional untuk menciptakan kesejahteraan sosial jauh dari kenyataan. Demokrasi liberal dipandang hanya menguntungkan kepentingan kelompok dan individu namun kesejahteraan sosial rakyat banyak diabaikan. Oleh karena itu dalam praktek demokrasi terpimpin, Sukarno menerapkan prinsip persamaan dalam demokrasi atau yang diistilahkan dengan sosio-demokrasi yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

DEMOKRASI DAN PERDEBATANNYA

Demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab ia memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif, dan dinamis. Maka, tidaklah mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai demokrasi. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya berjauhan dengan doktrin umum demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai model demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, dan lain-lain (Suhelmi, 2001).

Namun, jika memandang demokrasi secara ideal, sesungguhnya terdapat dua ciri atau karakteristik universal yang terdapat dalam demokrasi, yang pertama merujuk kepada pemikiran Aristoteles tentang tujuan dibentuknya negara dan jumlah orang yang memegang kekuasaan bahwa suatu bentuk negara boleh disebut baik, jika kekuasaan dipegang oleh orang banyak/rakyat untuk kebaikan bersama. Yang kedua adalah nilai yang terkandung didalam demokrasi yakni kebebasan dan persamaan. Ciri dasar yang kedua inilah yang menjadi akar perdebatan teoritis tentang makna dan hakikat demokrasi yang sesungguhnya sejak ribuan tahun lalu hingga kini yang pada pokoknya menyoroti aspek politik, ekonomi, dan budaya dimana dalam perkembangannya saat ini oleh beberapa intelektual yang memandang demokrasi (politik) secara formal saja justru menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi (Rueschmeyer, Stephens, dan Stephens, 1992).

Gould (1993) mengajukan teorisasi baru dan peninjauan kembali landasan filosofis demokrasi dengan melakukan kritik terhadap dua kutub utama dalam filsafat politik, yakni liberalisme dengan prinsip kebebasan dan sosialisme yang mengusung persamaan. Pandangan mengenai liberalisme bermula dari premis bahwa kebebasan individu merupakan nilai utama yang harus dilindungi oleh negara, termasuk kepemilikan pribadi. Pandangan ini dikembangkan menjadi teori yang mengharuskan negara menjamin kebebasan sipil dan hak-hak politik yang setara bagi setiap orang. Aktivitas anggota masyarakat dipahami lebih sebagai urusan privat ketimbang publik, dan oleh karenanya berada di luar yurisdiksi kekuasaan negara.

Kemudian kritik muncul dari kalangan sosialis yang menganggap bahwa konsepsi demokrasi liberal tersebut bersifat asosial dan individualistik serta tidak memperhatikan persamaan atau kepentingan umum. Selain itu, demokrasi liberal dituding mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, karena memberikan dukungan ideologis agar negara memberi perlindungan atas kepemilikan pribadi, sehingga dapat memunculkan akumulasi properti di tangan segelintir orang. Kelompok sosialis yang paling radikal mengkritisi falsafah liberal tersebut adalah paham yang berasal dari pemikiran Karl Marx atau yang kemudian dikenal sebagai marxisme.

Teorisasi demokrasi dalam sosialisme lebih menekankan sentralisasi kepentingan sosial atau kepentingan bersama dalam bentuk kepentingan kelas maupun solidaritas manusia sebagai motif untuk bertindak. Jadi, teori sosialis mengusulkan persamaan sosial dan ekonomi sebagai norma yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian teori ini pada dasarnya bukan tentang demokrasi politik, sebagaimana yang melekat pada liberalisme, meski memang dikembangkan diatas konsep demokrasi, baik dalam kritik maupun alternatif yang dihasilkannya.

Lebih lanjut, Gould mengemukakan terkait dengan persoalan praktik nilai persamaan, teori sosialis memiliki berbagai penafsiran. Penafsiran yang dominan, yang telah menuntun praktik kebanyakan masyarakat sosialis selama ini, mengusulkan perlunya kekuasaan negara yang kuat dan terpusat serta perlunya perencanaan ekonomi yang terpusat pula. Kontrol politik terhadap ekonomi dan perencanaan semacam ini tampaknya diperlukan untuk perkembangan produksi guna memenuhi kebutuhan materi manusia dan untuk mengembangkan sistem distribusi yang mampu memenuhi nilai persamaan. Sementara itu, koperasi sosial tampaknya muncul dari berkembangnya kolektivitas kerja, sedangkan negara itu sendiri terlihat sebagai perwakilan atau perwujudan dari seluruh masyarakat atau kepentingan kolektif.

Namun, teori sosialis tersebut juga tak luput dari kritik yang memandang bahwa konsep tersebut membiarkan dan bahkan mengizinkan berlakunya kekuasaan negara yang otoriter dan dikekangnya kebebasan individu. Hal ini sering dipahami bahwa hak-hak individu disubordinasikan demi kolektivisme. Selain itu, karakteristik ekonomi dan

perencanaan terpusat dalam masyarakat sosialis telah terbukti tidak efisien dalam setiap kegiatan peningkatan produksinya untuk menyediakan kondisi bagi kemakmuran dan dalam mencapai tujuan distribusi yang merata. Terakhir, para pengkritiknya menilai teori sosialis seringkali cenderung reduksionis dalam menafsirkan seluruh gejala sosial sebagai akibat faktor ekonomi. Kecenderungan determinisme ekonomi ini pada gilirannya mendorong diingkarinya dimensi-dimensi lain dalam kehidupan sosial dan terutama kebebasan serta demokrasi politik.

Selain di Barat, perdebatan mengenai teori demokrasi juga terjadi di Indonesia terutama sejak masa pergerakan nasional menentang rezim imperialisme Belanda. Meskipun pada dasarnya perdebatan tersebut sama-sama menggunakan sudut pandang sebagai negara jajahan yang secara sosio-kultural juga berbeda dengan kondisi di Barat, namun perdebatan mengenai demokrasi tersebut secara fundamental tetap kontras berkaitan dengan nilai kebebasan dan persamaan. Tokoh-tokoh nasional seperti Sukarno, Tan Malaka, Hatta, dan Sjahrir adalah nama-nama yang juga secara intelektual memiliki konsepsinya masing-masing mengenai bentuk negara yang dicita-citakan kelak ketika Indonesia merdeka agar menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Kesemuanya seolah sepakat bahwa demokrasi adalah bentuk negara yang ideal yang didalamnya rakyat memegang kekuasaan dan mengantarkan rakyat kepada cita-cita bernegara. Namun, secara teoritis, tiap-tiap tokoh memiliki pemikirannya masing-masing mengenai bagaimana memaknai demokrasi dan bagaimana praktiknya. Dalam konteks ini, yang akan diuraikan lebih mendalam adalah konsepsi pemikiran Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin yang pernah menjadi suatu orde pemerintahan Republik Indonesia.

DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN SUKARNO

Untuk memahami konsep demokrasi terpimpin yang dicetuskan Sukarno pada tahun 1950-an, maka perlu dipahami bahwa demokrasi terpimpin tidak lahir begitu saja sebagai antitesis dari praktik demokrasi liberal pada masa itu. Namun, jauh sebelum itu, yakni di masa Sukarno muda, ide tersebut telah muncul dari pergulatan intelektual Sukarno yang menyaksikan secara langsung penindasan oleh rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda.

Pada dasarnya, corak pemikiran Sukarno mengenai demokrasi sangat erat pengaruhnya dengan kondisi pada masa imperialisme, terutama sikapnya yang anti terhadap segala hal yang berkaitan dengan imperialisme termasuk bagaimana negara imperialisme itu menjalankan politik pemerintahan negaranya.

Menurut Sukarno (1985), perjuangan kemerdekaan bukan dengan meminta belas kasihan kaum imperialis, atau ikut dalam pemerintahan atau parlemen negara kolonial, akan tetapi secara radikal menggunakan prinsip non kooperasi. Non kooperasi adalah sikap tidak bersedia kerjasama dalam bentuk apapun dengan kaum imperialis.

Setelah menetapkan non kooperasi, Sukarno menyerukan agar menyusun kekuatan rakyat (*machtsvorming*) menjadi suatu massa aksi yang lahir dari kesadaran massa rakyat untuk berjuang melawan imperialisme. Sebagai media untuk menyusun kekuatan (*machtsvorming*) dan mengerahkan tenaga (*machtsaanwending*) massa aksi tersebut, maka Sukarno menyarankan dibentuknya partai pelopor (Sukarno, 1964).

Kemudian, Sukarno menegaskan bahwa meskipun kemerdekaan telah diraih, namun tidak menjadi jaminan bahwa kapitalisme dan imperialisme turut lenyap. Menurut Sukarno, kemerdekaan hanyalah suatu jembatan emas yang dapat pecah ujungnya pada dua jalan, yakni masyarakat sama rasa sama rata atau masyarakat sama ratap sama tangis. Masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan jika marhaen yang memegang kekuasaan negara melalui demokrasi.

Namun sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Sukarno sangat skeptis terhadap segala hal yang menyangkut imperialisme, termasuk demokrasi yang lahir di Barat. Dalam konteks ini, sistem demokrasi berkembang sejak meletusnya Revolusi Perancis tahun 1789 yang dipelopori oleh kaum borjuis. Rakyat diberikan kebebasan seluas-luasnya termasuk ikut dalam pemerintahan. Akan tetapi kebebasan tersebut hanyalah di bidang politik. Di bidang ekonomi, rakyat tetap mengalami penindasan. Dalam perspektif marxisme, bedanya penindasan tidak dilakukan oleh kaum feodal tetapi oleh kaum borjuis kepada kaum proletar dalam proses produksi.

Demokrasi tersebut tidak dikehendaki oleh Sukarno dalam negara yang hendak dibangun kelak ketika Indonesia merdeka. Sukarno (1964) mengatakan:

“Ah, kaum borjuis! Kaum borjuis telah menipu mereka, memperkudakan mereka, mengabui mata mereka. Demokrasi yang mereka rebut dengan harga nyawa yang begitu mahal itu, demokrasi itu bukanlah demokrasi kerakyatan yang sejati, melainkan suatu demokrasi borjuis belaka, — suatu burgerlijke demokrasi yang untuk kaum borjuis dan menguntungkan kaum borjuis belaka. Ah parlemen! Tiap-tiap kaum proletar kini namanya bisa memilih wakil dan ikut dipilih jadi wakil kedalam parlemen itu, tiap-tiap kaum proletar kini namanya bisa “ikut memerintah”... Tetapi pada saat yang ia namanya bisa menjadi “raja” didalam parlemen itu, pada saat itu juga ia sendiri bisa diusir dari pekerjaan dimana ia bekerja menjadi buruh... Pada saat yang ia namanya bisa menjadi “raja” didalam parlemen, pada saat itu juga ia tidak berkuasa sedikitpun juga menuntut upah-perkulian yang agak pantas, tak berkuasa sedikitpun menghalangi, yang stelsel kapitalisme menelan segenap ia punya dan segenap ia punya nyawa!”

Maka, dalam negara Indonesia yang hendak dibangun menurut Sukarno haruslah menganut demokrasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, bukan meniru demokrasi yang berkembang di Barat tersebut. Untuk melahirkan paham demokrasi tersebut lahirlah terlebih dahulu sosio-nasionalisme. Dasar prinsip sosio-nasionalisme adalah menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir akan tetapi hanya jembatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Konsekuensinya adalah segala hal yang dibangun setelah mencapai kemerdekaan adalah demi kesejahteraan kaum marhaen termasuk sistem politik yang akan dibangun.

Dalam konteks ini, sistem yang sesuai adalah demokrasi namun bukan demokrasi Barat yang liberalistis. Akan tetapi demokrasi yang menjamin keselamatan marhaen. Demokrasi tersebut diistilahkan oleh Sukarno dengan sebutan sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sebab demokrasi politik saja tidak bisa mendatangkan kesejahteraan bagi marhaen oleh karena itu demokrasi politik yang menjamin kesejahteraan marhaen adalah demokrasi ekonomi.

Menurut Ismalina (2013), dalam peta ideologi dunia, sosio-demokrasi berasal dari tradisi sosialis-reformis yang berbeda dengan tradisi sosialis-radikal. Fokus utama sosio-demokrasi adalah pada pembangunan kebijakan kesejahteraan sosial. Kunci dari sosio-demokrasi adalah keberadaan barang publik (barang yang disediakan pemerintah) dan konsumsi kolektif. Itu adalah konsep yang bertolak belakang dengan konsep kepemilikan barang pribadi serta konsumsi pribadi (yang merupakan jantung pemikiran kapitalisme).

DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada masa Sukarno merumuskan konsep demokrasi yang dikenal dengan sosio-demokrasi, memang tidak secara komprehensif dijelaskan bagaimana seharusnya pemerintahan negara itu dilaksanakan. Hal tersebut sangatlah wajar sebab pemikiran Sukarno pada saat itu lebih tercurahkan pada perjuangan kemerdekaan nasional (Ilmar, 2016). Akan tetapi pada masa kemerdekaan, Sukarno kembali menekankan secara lebih jelas tentang konsep demokrasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, Munculnya demokrasi terpimpin tidak terlepas dari berbagai macam gejolak yang muncul di era demokrasi liberal (1950-1959), terutama arah nasional yang tidak jelas karena lebih banyak pertikaian politik antara elit baik di pusat maupun daerah. Demokrasi liberal membawa malapetaka politik berupa konflik daerah akibat kesenjangan ekonomi dan gejolak akibat adanya liberalisasi politik yang membuat berbagai elemen dan kekuatan politik terutama partai politik terfragmentasi secara ekstrim dalam dinamika yang tidak sehat tanpa memperdulikan arah bersama dalam membangun cita-cita tersebut.

Rezim demokrasi liberal pada saat itu menganut sistem parlementer. Kekuasaan pemerintahan tidak berada di tangan Presiden, melainkan oleh Perdana Menteri yang diangkat oleh parlemen. Fragmentasi politik yang terjadi di parlemen ini lah yang mengakibatkan jalannya pemerintahan tidak stabil, krisis di parlemen tersebut kemudian menyebabkan jatuh bangun kabinet secara intens. Para elit partai dinilai korup, dan mengabaikan kepentingan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Menurut Sukarno (2001), demokrasi liberal tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi yang sesuai dengan cita-cita kaum marhaen tersebut adalah demokrasi di bidang politik dan demokrasi di bidang ekonomi atau menurut istilah Sukarno sebagai sosio-demokrasi. Dalam konteks negara Indonesia yang tercerai berai akibat polarisasi kepentingan pada era demokrasi liberal, perlu adanya suatu kepemimpinan dalam demokrasi yang berbasiskan massa-marhaen. Maka Sukarno merumuskan demokrasi terpimpin untuk mengejawantahkan konsep sosio-demokrasi pada kondisi Indonesia saat itu.

Melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin dapat diterapkan di Indonesia. Dasar hukum diterapkannya demokrasi terpimpin adalah Pancasila dan UUD

1945. Demokrasi terpimpin membawa obsesi untuk mempersatukan kembali kaum marhaen yang tercerai berai pada saat itu. Sehingga pada penerapannya, demokrasi terpimpin ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang terpimpin dan terarah agar pembangunan nasional dapat diwujudkan secara terarah. Konsekuensi di bidang ekonomi pun demikian, yakni ekonomi terpimpin untuk menghindari praktik liberalisme dan kapitalisme.

Namun, dari seluruh segi pemikiran Sukarno diatas, konsep persatuan dan kesejahteraan sosial merupakan bagian terpentingnya. Dalam konteks pemikiran politiknya, Sukarno lebih menghendaki adanya satu partai negara sebagaimana gagasannya terdahulu. Adanya banyak partai seperti pada masa liberalisme, menurutnya justru membawa kepada situasi perpecahan di tengah kondisi bangsa yang baru merdeka. Kebijakan penyederhaan kepartaian dikonsepsikan Sukarno sebagai jawaban kritis atas gejolak politik yang melanda Indonesia pada era demokrasi liberal.

Maka, setelah demokrasi liberal digantikan kepada demokrasi terpimpin sejak dekrit presiden 1959, konsekuensinya adalah upaya persatuan kekuatan-kekuatan politik yang tercerai berai pada era demokrasi liberal. Demokrasi politik yang menjamin demokrasi ekonomi hendaknya berdasarkan pada persatuan nasional kekuatan marhaen. Oleh karena itu, untuk menegaskan demokrasi yang bersifat kemarhaenan tersebut adalah dengan menyingkirkan kekuatan politik yang ditungggangi oleh kaum kapitalis melalui persatuan kekuatan politik yang revolusioner. Namun bukan bermaksud menyingkirkan ideologi atau partai politik tertentu secara otoriter.

PRESIDENSIALISME DAN KONFIGURASI POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN

Pada tanggal 5 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden yang pada intinya berisikan, penetapan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan secara otomatis UUDS 1950 tidak berlaku lagi, pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang terdiri dari anggota DPR dan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan, dan pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Dekrit tersebut juga sekaligus menandai perubahan rezim politik dari demokrasi liberal ke demokrasi

terpimpin. Dengan demikian, perubahan rezim tersebut juga diikuti oleh perubahan konfigurasi politik yang terbentuk atau tersusun dalam kerangka demokrasi terpimpin.

Dalam konteks kekuasaan politik juga terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif yang sebelumnya dipegang oleh perdana menteri dalam sistem parlementer, maka dengan berlakunya kembali UUD 1945 sistem yang diselenggarakan adalah sistem presidensial, yang berarti kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden.

Menurut Yuda (2010), agar pemerintahan sistem presidensial dapat dijalankan secara efektif, ada beberapa indikator, yaitu: adanya efektivitas sistem, bahwa relasi antar aktor dan institusi presidensialisme berjalan sesuai aturan. Dan adanya efektivitas personalitas presiden, menyangkut kemampuan dan karakter personal presiden dalam menerapkan presidensialisme sesuai rumusan konstitusi.

Dalam praktiknya di demokrasi terpimpin, Sukarno dapat dikatakan mampu memperkuat sistem presidensialisme meskipun jika menggunakan indikator yang dikemukakan diatas tidak semuanya terpenuhi. Efektifitas tersebut terlihat dari personalitas presiden. Namun menyangkut efektifitas sistem, ada beberapa unit yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari sisi personalitas, kepribadian Sukarno yang kharismatis dengan kecakapan intelektual dan kapabilitas kepemimpinan yang dimilikinya sejak muda dengan berbagai pengalaman memimpin pergerakan massa dan memobilisasinya telah menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh pergerakan terkemuka, terlebih pada saat dirinya memimpin PNI.

Namun, sejak menjadi Presiden, Sukarno tidak memiliki basis organisasi politik kecuali mengandalkan kemampuan personalitas tersebut. Idealnya, dalam sistem presidensial, presiden membutuhkan dukungan partai yang dominan di parlemen untuk menjamin stabilitas pemerintahan guna memperlancar kebijakan politiknya. Kekuatan mayoritas inilah yang sulit diperoleh oleh partai eksekutif dalam sistem parlementer, kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Hal ini pernah diupayakan Sukarno pada awal-awal kemerdekaan dengan menjadikan PNI sebagai partai negara.

Namun, PNI yang dibentuk Sukarno dulu sudah berubah sejak ditinggalkannya. Watak revolusioner yang menjadi dasar pergerakan PNI sudah dimanipulasi oleh golongan atau kelompok di dalam PNI yang berwatak birokratis dan cenderung korup. Oleh karena itu, kekuatan PNI didalam parlemen dinilai sudah tidak membawa kepentingan umum, tetapi hanya membawa kepentingan elit dan kelompok. Hal ini pulalah yang turut mendasari Sukarno lebih memilih dekat dengan Partai komunis Indonesia (PKI). PKI dianggapnya lebih radikal dan revolusioner. Namun Sukarno sadar tidak dapat hanya bertumpu pada PKI untuk mempengaruhi dinamika yang ada di dalam parlemen.

Oleh karena itu, melalui Penpres No. 13 Tahun 1959, Sukarno membentuk Front Nasional. Dalam penetapan itu disebutkan bahwa Front Nasional adalah organisasi massa yang bertujuan menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, membangun semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dan mengembalikan Irian Barat ke wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Latar belakang timbulnya pikiran untuk mendirikan Front Nasional pada masa itu adalah keinginan Sukarno untuk memasukkan golongan fungsional ke dalam parlemen. Kekuatan politik dari Front Nasional inilah yang sesungguhnya hendak digunakan Sukarno untuk mewujudkan ide-idenya dengan menghimpun berbagai elemen dalam masyarakat.

Dengan kemampuan personalitasnya diatas dan dukungan dari berbagai kekuatan politik seperti Front Nasional, PKI dan yang terpenting dukungan militer, Sukarno banyak menerapkan kebijakan politik yang radikal seperti pembubaran partai politik yang dianggap subversif, penyederhanaan kepartaian, pembentukan badan-badan usaha milik negara, perombakan hak kepemilikan tanah, dan lain sebagainya.

Namun, di saat kekuasaan Sukarno menguat melalui sistem presidensial, demokrasi terpimpin telah membentuk suatu konfigurasi politik baru. Militer juga secara efektif telah memanfaatkan sistem ini untuk membangun mesin politik guna mengimbangi Sukarno dan PKI. Begitu juga dengan PKI yang memanfaatkan personalitas Sukarno untuk mempengaruhi rakyat dan memperluas basis massanya. Beberapa pengamat seperti Feith (1962) mengatakan konfigurasi politik pada masa demokrasi terpimpin membentuk suatu segitiga kekuasaan.

Demokrasi terpimpin memang menempatkan Sukarno pada posisi di puncak segitiga kekuasaan tersebut. Namun pada prakteknya ada “dua muka” demokrasi terpimpin yang dijalankan, yaitu konsepsi Sukarno dan politik TNI Angkatan Darat. Konsepsi Sukarno lebih mengekspresikan kekecewaannya pada sistem multipartai yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak mempedulikan persatuan nasional. Sementara bagi militer sistem ini lebih efektif dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi politik menghadapi PKI baik pada aras “strategi atas” maupun politik di tingkat territorial (Wilson, 2013).

Begitu juga dengan PKI, setelah tahun 1948 diberangus karena dianggap memberontak, PKI dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan dan sekaligus dimusuhi oleh hampir semua kalangan elit tradisional yang ada di Indonesia (Lev, 1966). Dalam era demokrasi terpimpin, Sukarno lebih dekat dengan PKI, karena ia menginginkan perubahan sosial revolusioner yang berpilar pada gerakan anti imperialisme. Dan pimpinan PKI memahami peran penting organisasi mereka yang juga sevisi dengan Sukarno dalam upaya melakukan perubahan revolusioner.

EKONOMI TERPIMPIN

Penerapan dari konsep demokrasi ekonomi dalam sistem demokrasi terpimpin diwujudkan dalam bentuk ekonomi terpimpin. Seperti halnya, konsep demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin juga merupakan antitesis dari liberalisme dalam bidang ekonomi (kapitalisme). Ekonomi di era demokrasi liberal adalah ekonomi yang menempatkan modal swasta berperan secara besar dalam mengoperasikan kegiatan ekonomi dan minimnya perhatian terhadap sektor-sektor ekonomi yang banyak digeluti kaum marhaen.

Partai-partai politik dan militer memiliki kebebasan untuk menguasai sumber-sumber ekonomi yang ada bukan demi kesejahteraan sosial, melainkan untuk membangun kekuatan bagi kelompok dan individu. Selain itu, menurut Sukarno, dalam tahun 1950 boleh dikatakan aktivitas ekonomi Indonesia sebagian terbesar masih dikuasai oleh bangsa asing, sehingga baik pemerintah maupun rakyat, tidak dapat mengadakan perencanaan secara pokok bagi pertumbuhan ekonomi secara revolusioner. Kondisi ini sejalan dengan tesis Sukarno yang mengatakan bahwa demokrasi politik saja tidak dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat

banyak. Maka Sukarno merumuskan konsep ekonomi terpimpin yang didasarkan pada prinsip persamaan ekonomi.

Pilihan untuk menetapkan ekonomi terpimpin sebagai sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah upaya untuk memperkuat peran negara dalam perekonomian sesuai pasal 33 UUD 1945 (Ismalina, 2013). Namun, banyak pihak menafsirkan sistem ekonomi terpimpin tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari sikap otoriter Sukarno. Padahal, pilihan pada sistem ekonomi terpimpin adalah penegasan Sukarno akan perlawanannya terhadap kapitalisme.

Dalam sistem ekonomi terpimpin, upaya pemerintah dan rakyat yang sudah ditempuh secara konsepsional, organisatoris, dan struktural ialah, misalnya: *Pertama*, perencanaan pembangunan merupakan bagian dari strategi dan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh lembaga negara Dewan Perancang Nasional. Kemudian juga menyusun suatu “Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana” yang di era Orde Baru reformulasi sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). *Dua*, menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil sebagai sarana mendistribusikan kesejahteraan sosial. *Tiga*, peranan pemerintah dalam industrialisasi dan perdagangan internasional; dan *Empat*, Penyusunan PN (Perusahaan Negara) atau yang kini dikenal dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), koperasi, dan lain sebagainya.

Namun, dalam praktiknya, penerapan konsepsi ekonomi terpimpin tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti dikemukakan sebelumnya, kompleksitas permasalahan yang muncul lebih kuat disebabkan oleh pergesekan dalam konfigurasi politik demokrasi terpimpin. Pergesekan yang terjadi antara PKI dan militer tidak hanya terjadi dalam ranah politik. Justru semakin jelas pertentangannya dalam bidang ekonomi dimana kedua kekuatan tersebut bergerak menjalankan strategi dan kebijakan di bidang ekonomi, misalnya dalam persoalan yang sangat mendasar yaitu nasionalisasi aset asing dan pelaksanaan *land-reform*.

Penerbitan UU Nasionalisasi Aset asing sesungguhnya juga dipicu oleh memanasnya hubungan politik antara Indonesia dengan Belanda terkait kasus Irian Barat. Maka dalam rangka pembebasan Irian Barat, pemerintah mengeluarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang

Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Nasionalisasi ini bertujuan memberi manfaat pada rakyat Indonesia (demokrasi ekonomi) serta memperkuat keamanan dan pertahanan negara. lebih dari 160 perusahaan Belanda dinasionalisasi, akan tetapi hanya militer yang untung karena aset-aset tersebut dikuasai oleh militer yang juga melakukan bisnis. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak keberadaan militer dalam penjagaan dan penguasaan aset-aset perusahaan asing akibat pemberontakan daerah melalui penetapan keadaan darurat perang. Dari situ, para perwira militer mulai menguasai sektor bisnis dan industri yang di masa selanjutnya perekonomian nasional terganggu.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan *land reform* sesuai dengan UUPA No 5 tahun 1960, memprioritaskan redistribusi tanah bagi petani miskin, menegaskan fungsi sosial dari tanah serta larangan dominasi pihak swasta dalam sektor agraria. Namun, kelambanan dalam penerapan UU tersebut memicu aksi sepihak kaum tani dengan menduduki lahan-lahan milik perkebunan swasta dan negara. Kepemilikan lahan tersebut kebanyakan dikuasai oleh kelompok feodal yang berafiliasi pada PNI dan pemuka agama yang berafiliasi pada Nahdlatul Ulama (NU). Akibatnya konfigurasi politik semakin menajam antara kekuatan Islam (NU), PNI, dan dukungan militer dengan PKI lain lain pihak.

Dari kondisi diatas, demokrasi terpimpin kemudian mengalami berbagai guncangan kuat. Soekarno tidak dapat lagi mengendalikan kekuatan-kekuatan politik pendukung demokrasi terpimpin. Penerapan konsep sosio-demokrasi dalam wajah demokrasi terpimpin tidak dapat berjalan lagi sebagaimana mestinya akibat faktor-faktor diatas. Puncaknya adalah peristiwa Gerakan 1 Oktober 1965 yang mengakhiri pertarungan antara militer dan PKI, dimana militer tampil sebagai pemegang kendali kekuasaan selanjutnya dan dengan kekuasaan tersebut berhasil memberangus PKI. Selain itu, juga krisis ekonomi tidak dapat terelakkan lagi pada masa itu. Faktor utama terjadinya krisis adalah adanya sabotase ekonomi asing (imperialis) dan berbagai pergolakan politik. Pengendalian ekonomi nasional melalui badan-badan usaha milik negara juga banyak mengalami penyelewengan yang ditengarai manajemennya dijalankan oleh pihak militer. Dengan demikian, demokrasi terpimpin berakhir seiring jatuhnya Sukarno dari kekuasaannya.

KESIMPULAN

Melalui Dekrit 5 Juli 1959, Sukarno berhasil mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 dan dengan demikian mengubah rezim kekuasaan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Perubahan politik tersebut juga diikuti dengan perubahan konfigurasi politik yang berlandaskan pada sistem presidensial. Demokrasi terpimpin membawa obsesi untuk mempersatukan kembali kaum marhaen yang tercerai berai pada saat itu dalam satu poros kekuatan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Perpecahan tersebut banyak disebabkan oleh pertikaian politik yang dimainkan oleh elit-elit partai. Sehingga tujuan kemerdekaan nasional untuk menciptakan kesejahteraan sosial jauh dari kenyataan. Demokrasi liberal dipandang hanya menguntungkan kepentingan kelompok dan individu namun kesejahteraan sosial rakyat banyak diabaikan. Oleh karena itu dalam praktik demokrasi terpimpin, Sukarno menerapkan prinsip persamaan dalam demokrasi atau yang diistilahkan dengan sosio-demokrasi yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dalam bentuk kontrol ekonomi kolektif atau yang dinamakan ekonomi terpimpin dengan membentuk lembaga-lembaga penguasaan produksi nasional dan kebijakan ekonomi yang dikendalikan oleh negara.

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berlandaskan demokrasi ekonomi, strategi dan kebijakan politik yang diterapkan oleh Sukarno sangat mendukung ke arah tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya, demokrasi terpimpin “digagalkan” oleh kelompok-kelompok yang terusik dengan “kedaulatan rakyat” dari demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Prahara politik antara militer dan PKI merupakan faktor besar jatuhnya demokrasi terpimpin. Sukarno memang memainkan perang penting sebagai pengendali kekuatan-kekuatan tersebut. Namun tekanan kuat yang dilakukan oleh militer dan PKI dan gesekan-gesekan politik langsung antara keduanya, tidak dapat dikontrol lagi oleh Sukarno. Ditambah lagi dengan berbagai penyelewengan kekuasaan badan usaha nasional yang seyogyanya diperuntukkan bagi rakyat banyak serta pengagalan pelaksanaan *land reform* yang ditentang oleh kolaborasi militer dan ormas tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan konsepsi demokrasi terpimpin yang dirumuskan oleh Soekarno runtuh seiring kejatuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict dan Kahin, Audrey, *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Ithaca: Cornell University, 1982.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy*, Ithaca: Cornell University Press, 1962.
- Feith, Herbert dan Castles, Lance, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Gould, Carol, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Heywood, Andrew, *Political Theory An Introduction 2nd Edition*, New York: Palgrave, 1999.
- Ilmar, Anwar, *Pemikiran Politik Sukarno Tentang Sosialisme Indonesia dan Praktiknya Pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Tesis Magister, Depok: Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016.
- Ismalina, Poppy, *Pemikiran Ekonomi Soekarno*, dalam Dhakidae, Daniel, ed. *Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putera Sang Fajar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013.
- Lev, Daniel, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.
- Reilly, Benjamin, *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Revitch, Diane dan Thernstrom, Abigail *Demokrasi: Klasik dan Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Rueschmeyer, Dietrich, Huber, Stephens, Evelyns dan Stephens, John, *Capitalist Development and Democracy*, Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism & Democracy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sukarno, Ir., *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.

- , *Sarinah: Kewajiban Dalam Perdjongan Republik Indonesia*, Jakarta: Panitia Penerbit Buku-Buku Karangan Presiden Soekarno, 1963.
- , *Tudjuh Bahan Pokok Indoktrinasi*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1961.
- , *Menyelamatkan Republik Proklamasi*, dalam Toto. Imam, K. Rahardjo dan WK, Herdianto (Ed), *Bung Karno: Wacana Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta: PT Grasindo, 2001.
- , *Deklarasi Ekonomi*, dalam Toto. Imam, K. Rahardjo dan WK, Herdianto (Ed), *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta: PT Grasindo, 2001.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Usman, Syafaruddin dan Isnawita, *Neoliberalisme Mengguncang Indonesia*, Jakarta: Narasi, 2009.
- Wilson, Soekarno, *Staatspartij, dan Demokrasi Terpimpin*, dalam Dhakidae, Daniel (ed.), *Soekarno: Mendingkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar*, Jakarta : Kompas, 2013.
- Yuda, Hanta, *Presidensialisme Setengah hati*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.